

PERAN BIROKRASI DALAM KEBIJAKAN PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN

¹Sarmila, ²Andi Tenri Sanna, ³Sulham B

¹Jurusan Tarbiyah Prodi Mpi Institut Agama Islam Negeri Bone
email: msarmila705@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi implementasi program birokrasi dalam meningkatkan mutu pendidikan dan faktor yang mempengaruhi implementasi program birokrasi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles and Hubberman yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kata Kunci: Kebijakan Pendidikan, Peran Birokrasi. Mutu pendidikan.

PENDAHULUAN

Ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi dan modernisasi dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup pesat. Hal ini harus didukung dengan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan bermutu. Untuk meningkatkan kualitas dan mutu sumber daya manusia (SDM) bisa dilakukan dengan cara peningkatan mutu pendidikan, pendidikan sendiri merupakan suatu hal yang sangat penting bagi setiap individu. Karena dengan adanya pendidikan manusia akan memperoleh kesejahteraan dalam hidupnya. Menurut Brown pendidikan adalah proses secara sadar dimana perubahan-perubahan didalam tingkah laku dihasilkan didalam diri melalui kelompok pendidikan juga sebagai salah satu upaya untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berguna bagi bangsa dan negara.

Dalam dunia pendidikan, sebuah organisasi sangat diperlukan dalam rangka memperlancar fungsi dan proses pendidikan. Dalam menjalankan fungsi organisasi pendidikan tidaklah dapat dipisahkan dengan birokrasi. Pada dasarnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik khususnya pada pendidikan disekolah.

Menurut Zamroni, reformasi pendidikan pada era reformasi dewasa ini secara prinsip sebenarnya mengarah pada dua sasaran penting. Pertama reformasi pendidikan diarahkan untuk memberikan tanggung jawab lebih besar kepada birokrasi di daerah untuk secara langsung menangani pendidikan, dengan memobilisasi dukungan penuh masyarakat (desentralisasi). Kedua, reformasi ditujukan untuk meningkatkan dinamika internal sekolah, dengan memberikan kesempatan lebih besar pada level sekolah: kepala sekolah, guru, orang tua siswa, staf administrasi dalam melaksanakan penyelenggaraan sekolah sehari-hari (otonomi sekolah) atau disebut juga dalam wujud Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).¹

Dalam menjalankan fungsi organisasi pendidikan tidaklah dapat di pisahkan dengan organisasi. Pada dasarnya, birokrasi ini hakikatnya adalah salah satu perangkat yang fungsinya untuk memudahkan pelayanan publik. Birokrasi digunakan untuk dapat membantu mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan yang pasti akan mempengaruhi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Sekolah yang dipandang sebagai total sistem yang pengorganisasiannya dilakukan untuk mencapai suatu tujuan sesuai dengan jenis dan tingkatnya masing-masing.²

Birokrasi digunakan untuk dapat membantu mempermudah dalam memberikan layanan pendidikan yang pasti akan mempengaruhi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan. Birokrasi merupakan instrumen pembangunan pendidikan. Kekuatan birokrasi Indonesia sebetulnya bisa menjadi mesin penggerak yang luar biasa apabila mampu didayagunakan untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Jika birokrasi dijalankan dengan benar, konsisten dan bertanggung jawab, maka kualitas pendidikan akan maju.

METODE

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif, metode ini dipilih karena bertujuan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data dari hasil penelitian tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang memberikan gambaran tentang peran birokrasi dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu sumber dari mana data itu diperoleh. Sumber data terbagai menjadi dua macam yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Instrumen yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yaitu pedoman observasi, pedoman

¹ Zamroni, Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi (Prakondisi Menuju Era Globalisasi) (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), 204.

² Yoyon Bahtiar Irianto, Kebijakan Pembaharuan Pendidikan: Konsep, Teori dan Model (Jakarta: PT. RajawaliGrafindo Persada, 2012), 143.

wawancara, dan dokumentasi. Prosedur penelitian meliputi empat tahap yaitu tahap perencanaan, tahap pengumpulan data (observasi, wawancara dan dokumentasi), tahap analisis data dan data pelaporan. Sedangkan analisis data menggunakan empat tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Cara yang dilakukan dalam memperoleh kebenaran penelitian ini yaitu dengan menggunakan instrumen lembar ceklis dan wawancara semi terstruktur. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha memahami bagaimana pihak sekolah memanfaatkan birokrasi dalam peningkatan mutu pendidikan sekolah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam kajian implementasi pendidikan, kami mengambil beberapa rujukan teoritis tentang implementasi pendidikan ini. Dalam kamus Webster sebagaimana dikutip Sudiyono menyebutkan bahwa “to implement berarti to provide the means for carrying out”, mengimplementasikan berarti melengkapi atau menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu. Linberry menyatakan bahwa implementasi mencakup komponen berikut, Pertama, menciptakan dan menyusun staf sebuah agen baru untuk melaksanakan sebuah kebijakan baru; kedua, menterjemahkan tujuan legislatif dan serius memasukkannya ke dalam aturan pelaksanaan, mengembangkan panduan atau kerangka kerja bagi para pelaksana kebijakan; ketiga, melakukan koordinasi terhadap sumberdaya agen dan pembiayaan bagi kelompok sasaran, mengembangkan pembagian tanggungjawab para agen dan antar para agen serta hubungan antar agen; keempat, mengalokasikan sumberdaya untuk memperoleh dampak kebijakan.³

1. Peran Birokrasi dalam pendidikan.

Birokrasi secara sederhana diartikan sebagai organisasi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang menjalankan tugas sebagai penyedia (pelayanan) jasa kepada masyarakat. Dalam sebuah organisasi, baik organisasi swasta (private), maupun organisasi publik (public) termasuk organisasi pemerintahan di dalamnya terdapat organ-organ yang membentuk sebuah organisasi sehingga organisasi dapat berfungsi sebagaimana mestinya.⁴

Berkaitan dengan Renstra Kemendiknas 2010-2014, kebijakan pendidikan di Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun

³ Sudiyono dan Mada Sutapa, Kebijakan Pendidikan, Teaching Resource <http://eprints.uny.ac.id/173/>, (Yogyakarta: UNY, 2011), 8. Diakses 10 Juni 2020 Pukul 09.31.

⁴ Zaidan Nawawi, Manajemen Pemerintahan (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 71-72.

(Propenas)³⁰, ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghendaki pentingnya desentralisasi pendidikan atau otonomi pendidikan. Di sisi lain, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menganut semangat sentralistik. Di satu sisi, dirumuskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam suasana desentralistik. Selanjutnya menurut Benny Susanto sebagaimana dikutip Muhammad Rifai, kebijakan pembangunan nasional secara umum adalah mensukseskan terlaksananya otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan prioritas melanjutkan peningkatan, perluasan, pemerataan, kesempatan mendapatkan pendidikan, peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Namun di sisi lain, penguasa lebih mengutamakan tujuan/target daripada proses. Ada kecenderungan yang beraroma politis di dalamnya. Di satu sisi, ada upaya untuk meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik (guru) sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.⁵

Peran birokrasi dan partisipasi masyarakat sebagai kontrol pendidikan nasional merupakan fungsi birokrasi itu sendiri, mengontrol tugas pokok dan fungsi birokrasi pendidikan hingga pelaksanaan proses pendidikan di daerah supaya berjalan dengan baik. Menurut Tilaar, meningkatkan kemampuan kinerja birokrasi pendidikan dapat dilakukan melalui program pembinaan birokrasi pendidikan nasional yang profesional, ini dilakukan untuk menghapus stigma bahwa birokrasi merupakan kelompok yang sangat sulit untuk berubah. Mereka cenderung menjadi orang yang konservatif dalam melaksanakan tugasnya (business as usual).⁶

Ekspetasi birokratis adalah tuntutan dan kewajiban formal yang ditetapkan oleh suatu organisasi termasuk di satuan lembaga pendidikan; ekspetasi birokratis merupakan bahan mentah utama dalam struktur organisasional. Peran birokratis ditentukan oleh serangkaian ekspetasi yang dileburkan ke dalam posisi dan jabatan di dalam suatu organisasi tertentu. Di lembaga sekolah, jabatan kepala sekolah, guru dan siswa sangatlah penting dan masing-masingnya didefinisikan berdasarkan serangkaian ekspetasi. Ekspetasi birokratis memerinci dan menetapkan perilaku yang semestinya/tepat bagi peran atau posisi tertentu. Seorang guru, mengemban kewajiban untuk merancang pengalaman belajar para siswa dan memiliki tugas untuk melibatkan para murid dengan cara yang efektif secara pedagogis.

⁵ Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 65.

⁶ H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, 22.

Peran dan ekspetasi birokratis merupakan cetak biru resmi bagi aksi, yang merupakan hadiah/fasilitas organisasi jabatan.⁷

Singkat kata, organisasi formal semisal sekolah memiliki struktur yang terdiri atas ekspetasi dan peran birokratis, sebuah hierarki jabatan dan posisi, aturan dan peraturan, serta spesialisasi. Ekspetasi birokratis mendefinisikan peran-peran organisasional; peran dileburkan ke dalam posisi dan jabatan. Adapun posisi dan jabatan disusun ke dalam sebuah hirarki kewenangan/otoritas formal yang sesuai dengan kekuasaan dan status relatifnya. Aturan dan peraturan ditetapkan untuk memandu pengambilan keputusan dan meningkatkan rasionalitas organisasional, sedangkan tenaga kerja dibagi-bagi sesuai dengan spesialisasi individu di dalam tugas. Perilaku di sekolah sebagian ditentukan oleh struktur organisasinya; sebagian struktur mempermudah dan sebagian yang lain menghambat fungsi sekolah.

2. Faktor yang mempengaruhi implementasi birokrasi dalam pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Dunia pendidikan nasional di zaman reformasi ini, diakui atau tidak memiliki karakter yang menenggelamkan gerakan intelektual bagi kemajuan pendidikan nasional. Kecenderungan birokrasi pada lembaga pendidikan yang rumit dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat karena begitu banyaknya biro yang harus dilalui. Kesan mengutamakan aktivitas birokrasi inilah yang pada akhirnya mengesampingkan dunia intelektual. Mental birokrasi untuk memberikan pelayanan terhadap pengembangan dan gerakan intelektual ini menjadi sangat penting karena pengembangan dan gerakan intelektual di lembaga pendidikan memerlukan suasana dan kondisi yang sangat kondusif bagi munculnya kreativitas dan inovasi baru. Peran birokrasi yang berwajah manusia dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang pendidikan diharapkan sepenuhnya berperan vital, reformis, dinamis, inovatif, aspiratif terbuka dan bersifat mengayomi. Di sini, Kementerian Pendidikan Nasional segera mengambil sikap dengan untuk melakukan inovasi dan pemikiran, mereformasi struktur dan mekanisme birokrasi yang kondusif untuk menciptakan pendidikan yang unggul, walau memerlukan anggaran yang tidak sedikit dan kemampuan sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya.

Menurut Weber sebagaimana dikutip Zaidan Nawawi, rumusan birokrasi pada hakikatnya mengandung makna pengorganisasian yang tertib, tertata dan teratur dalam

⁷ Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel, *Administrasi Pendidikan: Teori, Riset dan Praktek*, diterjemahkan dari *Educational Administration: Teory, Research and practice* oleh Daryatno dan Rianayati K. Pancasari (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 36.

hubungan kerja yang berjenjang serta memiliki prosedur dalam tatanan suatu organisasi. Model birokrasi Weber adalah pembagian kerja yang sistematis. Mengacu pada teori Weber, Albrow mengajukan ciri-ciri utama birokrasi ideal antara lain, yaitu: (1) adanya struktur hierarki, termasuk pendelegasian wewenang dari atas ke bawah dalam organisasi; (2) adanya serangkaian porsi-porsi jabatan yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang tegas; (3) adanya aturan-aturan, regulasi-regulasi dan standar-standar formal yang mengatur tata kerja organisasi dan tingkah laku para anggotanya; (4) adanya personel yang secara teknis memenuhi syarat yang dipekerjakan atas dasar karier dengan promosi yang didasarkan atas kualifikasi dan penampilan (kinerja).⁸

Dewasa ini, perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karenaitu kemudian muncullah istilah baru diluar H.R (Human resourch), yaitu H.C atau human capital. Disini SDM dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dpat dilipatgandakan dan juga bukan sebaliknya sebagai beban. Disini perspektif SDM sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka.⁹

Lebih jauh Muhammad Rifai mengungkapkan tentang fokus utama Rencana Strategis (Renstra) Kemendiknas 2010-2014 adalah memberikan pelayanan yang berhubungan dengan birokrasi pendidikan nasional. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, kelahiran orde reformasi adalah respons atas buruknya birokrasi pada masa orde baru. Namun nyatanya, birokrasi pada masa orde reformasi tidaklah jauh berbeda. Masih menurut Rifai, di dalam Renstra Kemendiknas tersebut dikatakan bahwa persoalan birokrasi pendidikan berkaitan dengan reformasi birokrasi yang merupakan inti dari berbagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemendiknas menjadi salah satu Kementerian yang harus menyelesaikan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi sangat diperlukan sejalan dengan tanggungjawab yang semakin besar karena harus mengelola anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN/APBD. Berdasarkan kajian awal reformasi birokrasi pada tahun 2009, reformasi birokrasi dilaksanakan antara lain melalui kebijakankebijakan sebagai berikut: (1) restrukturasi organisasi yang mendukung visi dan misi Kemendiknas, (2) penyempurnaan tata laksana, (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia, (4)

⁸ Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 71-72.

⁹ Eri Susan "*Manajemen Sumber Daya Manusia*" Adara *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* Volume 9, No.2 (2019): 955

pengembangan sistem pengukuran dan remunerasi berbasis kinerja, dan (5) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi.¹⁰

Visi yang tertuang dalam Renstra Kemendiknas 2010-2014 yaitu terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan Indonesia cerdas komprehensif. Layanan prima di bidang pendidikan nasional tersebut meliputi aspek-aspek berikut: (1) tersedia secara merata di seluruh Indonesia; (2) terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; (3) berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan bermasyarakat, dunia usaha dan dunia industri; (4) setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial budaya, ekonomi, geografi, gender dan sebagainya; (5) menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk mengenyam pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia usaha dan dunia industri.

Berkaitan dengan Renstra Kemendiknas 2010-2014, kebijakan pendidikan di Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam Program Pembangunan Nasional lima tahun (Propenas)³⁰, ditetapkan oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menghendaki pentingnya desentralisasi pendidikan atau otonomi pendidikan. Di sisi lain, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menganut semangat sentralistik. Di satu sisi, dirumuskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam suasana desentralistik. Selanjutnya menurut Benny Susanto sebagaimana dikutip Muhammad Rifai, kebijakan pembangunan nasional secara umum adalah mensukseskan terlaksananya otonomi daerah di bidang pendidikan dan kebudayaan dengan prioritas melanjutkan peningkatan, perluasan, pemerataan, kesempatan mendapatkan pendidikan, peningkatan mutu, efisiensi, dan efektivitas pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Namun di sisi lain, penguasa lebih mengutamakan tujuan/target daripada proses. Ada kecenderungan yang beraroma politis di dalamnya. Di satu sisi, ada upaya untuk meningkatkan kemampuan akademik dan professional serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik (guru) sehingga mampu melaksanakan tugasnya secara optimal.¹¹

Peran birokrasi dan partisipasi masyarakat sebagai kontrol pendidikan nasional merupakan fungsi birokrasi itu sendiri, mengontrol tugas pokok dan fungsi birokrasi pendidikan hingga pelaksanaan proses pendidikan di daerah supaya berjalan dengan baik. Menurut Tilaar, meningkatkan kemampuan kinerja birokrasi pendidikan dapat dilakukan

¹⁰ Zaidan Nawawi, *Manajemen Pemerintahan* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), 62

¹¹ Muhammad Rifai, *Politik Pendidikan Nasional*, 65

melalui program pembinaan birokrasi pendidikan nasional yang profesional, ini dilakukan untuk menghapus stigma bahwa birokrasi merupakan kelompok yang sangat sulit untuk berubah. Mereka cenderung menjadi orang yang konservatif dalam melaksanakan tugasnya (business as usual).¹²

Mitzberg sebagaimana dikutip oleh Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel, “Administrasi Pendidikan: Teori, Riset dan Praktek” mengajukan serangkaian 4 (empat) sistem kekuasaan internal sebuah birokratis yang menjadi sumber dasar untuk mengontrol kehidupan organisasional (contoh kekuasaan internal di institusi pendidikan sebagaimana uraian di atas), yaitu berupa sistem otoritas, sistem ideologi (iklim dan budaya), sistem kepakaran, dan sistem politik. Berikut penjabaran keempat sistem tersebut di atas: (1) sistem otoritas merupakan arus formal kekuasaan melalui saluran-saluran sah yang memungkinkan organisasi mencapai tujuan-tujuan formalnya; (2) sistem ideologi; adalah serangkaian kesepakatan informal dikalangan guru tentang sekolah berikut hubungan-hubungannya dengan kelompokkelompok lain yang muncul sewaktu organisasi mengembangkan budayanya; (3) sistem kepakaran adalah hubungan timbal balik di kalangan pakar atau kaum profesional untuk memecahkan ketidakpastian-ketidakpastian darurat/genting yang dihadapi oleh organisasi; (4) sistem politik adalah jaringan politik organisasi yang tidak memiliki legitimasi dari tiga sistem kekuasaan lainnya. Sistem ini juga tidak memiliki konsensus dan peraturan. Politik bisa dilukiskan sebagai serangkaian permainan yang dimainkan oleh para pemilik kekuasaan. Permainan politik bisa hidup berdampingan dengan sistem-sistem yang sah, bermusuhan dengan sistem, atau menggantikan sistem-sistem kontrol yang sah.¹³

Adapun model implementasi kebijakan sebagai wujud pembaharuan manajemen di satuan pendidikan menurut Yoyon antara lain mencakup: (1) broad base education (bbe), life skills, dan kurikulum berbasis kompetensi (kbc); (2) manajemen berbasis sekolah (mbs); (3) penguatan pendidikan luar sekolah (pls) berbasis pkbm dan pkbm masyarakat; (4) kurikulum tingkat satuan pendidikan (ktsp) tahun 2006; (5) perguruan tinggi badan hukum milik negara (bhmn) menuju badan layanan umum (blu); (6) pengembangan model profesi kependidikan; (7) kebijakan ujian nasional (un); (8) antisipasi penolakan pembaharuan; (9) kebijakan sertifikasi guru dan dosen; (10) bantuan operasional sekolah (bos); (11) pendidikan karakter

¹² H.A.R Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, 22.

¹³ Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel, *Administrasi Pendidikan: Teori, Riset dan Praktek*, 360-361.

(kurikulum 2010); (12) perubahan ikip menjadi universitas;46 (13) kurikulum berbasismatik integratif 2013; dan lain-lain.

Model implementasi kebijakan di bidang pendidikan tersebut di atas dalam implementasinya harus menggunakan saluransaluran komunikasi yang mendukung kelancaran suatu ide atau gagasan dapat dicerna dengan baik oleh masyarakat. Ide-ide tersebut disosialisasikan dalam bentuk desiminasi skala regional maupun nasional.

KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi kebijakan dan peran birokrasi di bidang pendidikan dibutuhkan birokrasi pendidikan yang mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan dan memahami kebutuhan masyarakat yang dilayani. Kinerja birokrasi melalui responbilitas harus terus ditingkatkan untuk menciptakan pelayanan prima terutama merespon kepentingan publik. Lembaga pendidikan membutuhkan penghargaan dan perlakuan humanis ketimbang dijadikan sasaran eksploitasi dan kepentingan politis etis semata yang menegasikan tujuan utama dari pendidikan itu sendiri.

Peran birokrasi di lembaga sekolah pada akhirnya menjadi puncak model implementasi kebijakan pada satuan dan jenjang pendidikan. Di sini diperlukan adanya pembaharuan manajemen pada satuan dan jenjang pendidikan tersebut. Proses pembaharuan atau inovasi manajemen menjadi suatu keniscayaan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang tengah dihadapi. Problem-problem tersebut dapat berupa usaha pemerataan pendidikan, peningkatan mutu, peningkatan efisiensi dan efektifitas pendidikan serta relevansi pendidikan. Tujuannya agar supaya penyebaran ide-ide inovasi yang dilakukan bisa diadopsi, dimanfaatkan dan didesiminasikan untuk perbaikan dan pemecahan problematika pendidikan di Indonesia.

Saran berisi masukan konstruktif kepada pembaca atau peneliti demi perbaikan kajian peneliti sejenis dimasa mendatang sehingga dapat memberi kontribusi nyata dalam hal pengembangan ilmu. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan informasi yang diperoleh, maka peneliti dapat menyarankan beberapa hal yang dianggap perlu mengenai peran birokrasi dalam kebijakan mutu pendidikan disekolah bahwa perlunya meningkatkan fungsi birokrasi dalam sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar Yoyon Irianto. 2012. *Kebijakan Pembaharuan Pendidikan*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- H.A.R Tilaar. *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaa*.
- Muhammad Rifai. 2011. *Politik Pendidikan Nasional*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Munadi, Muhammad dan Barnawi. *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Susan, Eri “*Manajemen Sumber Daya Manusia*” Adara Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Volume 9, No.2 (2019): 955
- Sudiyono dan Mada Sutapa. 2011. *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: UNY.
- Wayne K. Hoy dan Cecil G. Miskel. 2014. *Administrasi Pendidikan: Teori, Riset dan Praktek, diterjemahkan dari Educational Administration: Teory, Research and practice oleh Daryatno dan Rianayati K. Pancasari*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zaidan Nawawi. 2013. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Zamroni. 2007. *Pendidikan dan Demokrasi dalam Transisi*. Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
<http://www.budialaksono.com/2015/01/pemaparan-rencana-strategis-2015-2019.html>.
Diakses 12 juni 2020 Pukul 20.35.
- <http://eprints.uny.ac.id/173/>,. Yogyakarta: UNY, 2011. Diakses 12 Juni 2020 Pukul 09.31.